



MASALAH SOSIAL: Pengemis "manusia silver" mengemis rupiah kepada pengguna jalan, di Jalan Mataram, Kota Jogja, beberapa waktu lalu. Pemkot Jogja melalui Dinsosakertrans terus berupaya untuk mengurangi orang-orang yang hidup di jalanan dengan menjadi gelandangan dan pengemis (gepeng) agar tidak menjadi masalah sosial di masyarakat.

GUNTUR AGA TIRTANA/RADAR JOGJA

Pemkot Jogja Fasilitasi Gepeng dari Luar Kota

Diberikan Tempat Penampungan dan Jadi Sasaran Jamkesda

JOGJA - Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosakertrans) Kota Jogja terus melakukan penertiban terhadap gelandangan dan pengemis (gepeng). Langkah ini terus dilakukan sebab gepeng merupakan salah satu masalah sosial.

Penelaah Teknis Kebijakan Seksi Rehabilitasi Sosial Dinsosakertrans Kota Jogja Heru Fitrianto mengatakan, dalam menangani permasalahan gepeng pihaknya memiliki dasar

hukum. Yakni Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis.

Selain itu, pemkot juga berpedoman pada Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi DIY Nomor 36 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur Penanganan Gelandangan dan Pengemis. Serta Undang-Undang 32 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah terkait kewenangan dalam panti adalah pemerintah provinsi.

Heru menyebut, dalam penanganan gepeng yang berasal dari luar kota pihaknya juga bekerjasama dengan pemerintah provinsi. Salah satunya

dalam hal penyediaan tempat penampungan agar para gepeng mendapatkan rehabilitasi sosial. "Jika mereka merupakan warga luar kota yang tidak memiliki identitas atau tempat tinggal, kami rujuk ke Camp Assessment Dinsos DIJ," ujar Heru, kemarin (5/9).

Ketua Tim Kerja Penjaminan dan Peningkatan Mutu Kesehatan, Dinas Kesehatan Kota Jogja Tuti Fidiyawati menerangkan, penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS). Gepeng pun menjadi perhatian pemerintah sebagai sasaran program jaminan kesehatan daerah (jamkesda). Masyarakat dapat melakukan beberapa hal

ketika menemukan PMKS yang butuh perawatan medis di Kota Jogja. Pertama, bisa membawa PMKS ke UGD rumah sakit. Sementara jika kondisinya darurat dapat menghubungi PSC YES 119 atau dengan telepon 0274-420118.

Menurut dia, perawatan PMKS di Kota Jogja menggunakan kelas tiga Jamkesda. Kemudian seluruh biaya perawatan juga ditanggung oleh pemerintah. Sampai saat ini sudah ada 19 rumah sakit yang bekerjasama dengan pemkot untuk program tersebut. Hingga Agustus terdapat satu pasien yang menggunakan layanan itu. **(inu/din/by)**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 29 November 2024
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005